



Sulistiani Rela Antre Token

Daftar Online PPDB TA 2019/2020

YOGYA, TRIBUN - Suasana Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Kota Yogyakarta sejak pagi sudah dipadati orangtua calon siswa SMA/SMK yang ingin mengambil token untuk mendaftar online PPDB TA 2019/2020.

Suratiman, petugas keamanan Balai Dikmen Kota Yogyakarta, mengungkapkan, suasana antre orangtua calon siswa mengular sejak dirinya tiba di Balai Dikmen Kota Yogyakarta sekitar pukul 06.00.

Menurutnya, pada waktu dia sampai, sudah ada sekitar 40 orang yang kebanyakan datang dari luar daerah.

● ke halaman 7

Presiden: Perlu Ada Evaluasi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta awak media menanyakan langsung permasalahan sistem zonasi dalam PPDB kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Menurut Jokowi, ada banyak ma-

● ke halaman 7

Kalau alasan kenapa mengambil token di awal seperti ini ya harapan nanti kalau ada syarat yang kurang bisa segera dipenuhi, kan waktunya masih banyak. Harapan di SMA 8 yang dekat rumah.

Sulistiani
Warga Warungboto



TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI

Sulistiani Rela

• Sambungan Hal 1

padahal untuk pengambilan token sendiri baru dilayani sekitar pukul 08.00.

"Tadi pagi pas saya sampai sudah ada sekitar 40 orang yang mau mengurus pengambilan token, memang kebanyakan luar DIY, makanya *meruput*. Kalau di sini petugas masuk jam 07.30, setelah ada petugas langsung dilayani. Kalau untuk mengurusnya nanti sampai Senin, kecuali Sabtu dan Minggu tutup," ungkapnya.

Suratiman, menjelaskan, sejak sebulan lalu sudah banyak orangtua dari berbagai daerah datang untuk meminta informasi mengenai PPDB. Meskipun demikian, pada saat pengambilan token hari ini masih banyak yang mengeluhkan kurang persyaratan.

"Kalau yang dikeluhkan dan laporan ke saya ada beberapa yang memang belum membawa Surat Keterangan Lulus (SKL), karena yang asli memang belum keluar. Saya memberi tahu untuk membawa surat pengantar dari sekolah yang sudah dilegalisir," terangnya.

Sulistiani, warga Waringboto, Yogyakarta, saat ditemui reporter *Tribun Jogja* mengaku belum bisa mengambil nomor antrean

lantaran masih mengurus SKL. Dia menerangkan, sebelumnya dia dan anaknya tinggal di Lampung, dan saat ini memilih menetap di Kota Yogyakarta.

"Anak kan sebelumnya SMP di Lampung, makanya secara otomatis yang dari luar DIY harus mengurus ke Balai Dikmen. Tadi sudah masuk tapi karena SKL-nya yang bukan asli saat ini tengah di fotokopi dan mau dilegalisasi terus dikirim lewat WA legalisasi, makanya kita menunggu. Kalau dari SKHUN yang asli kan memang belum keluar," ungkapnya.

Untuk pilihan sekolah nantinya Sulistiani berharap anaknya bisa diterima di SMAN 8 atau di SMAN 5 yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan rumahnya.

"Kalau alasan kenapa mengambil token di awal seperti ini ya harapan nanti kalau ada syarat yang kurang bisa segera dipenuhi, kan waktunya masih banyak. Harapan di SMA 8 yang dekat rumah," terangnya.

Hal senada diungkapkan Samsuri, asal Ponorogo, dan saat ini tengah bekerja di DIY. Dia mengaku memilih mengambil token kemarin sambil berjaga-jaga kalau ada persyaratan yang kurang di esok harinya.

"Biar ada waktu kalau ada yang kurang, hari ini

antre tidak apa-apa. Kalau anak SMP-nya kan di Jawa Timur, mau ikut di sini. Saya kerjanya di sini biar sekalian dekat. Ke sini tadi jam 09.00, antre tidak apa. Sebelumnya juga sempat ke Balai Dikmen untuk menanyakan persyaratan, dan Alhamdulillah hari ini sudah lengkap," ungkapnya.

Sementara itu, Didik Wardaya, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Disdikpora DIY, sebelumnya menjelaskan, bagi calon peserta didik lulusan luar DIY, pengambilan token hanya dapat dilakukan di Balai Dikmen Kabupaten/Kota.

"Untuk anak lulusan dari luar DIY, karena kami belum punya data apapun terhadap anak itu, makanya input datanya dilakukan di Balai Dikmen Kabupaten/ kota masing-masing. Misalnya dari Muntilan, mengambil token di Balai Dikmen Kabupaten Sleman bisa," katanya.

Adapun berkas maupun persyaratan yang diharuskan dibawa pada saat mengambil token yakni Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Peserta Ujian Nasional.

Selain itu, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP orangtua, fotokopi akta kelahiran dengan menunjukkan aslinya Surat rekomendasi

keterangan tidak mampu dari Balai Dikmen Kabupaten/Kota setempat bagi calon peserta didik yang menggunakan SKTM atau bukti lainnya. Suasana pengambilan token di Balai Dikmen Kota Yogyakarta, Kamis (20/6).

Pilih pulang

Pantauan di SMAN 8 Yogyakarta sekitar pukul 08.30, juga terjadi antrean orangtua calon siswa. Ada beberapa orangtua calon siswa yang memilih pulang karena melihat antrean yang sangat banyak.

Eti Kurnia, warga Umbulharjo, mengaku tiba di SMA 8 Yogyakarta sebelum pukul 07.00, menurutnya pembukaan loket pendaftaran baru dilayani sekitar pukul 08.15.

"Saat saya datang, sudah ada 100-an yang ada di aula. Sudah dari pagi memang sudah ada yang ke sini," ungkapnya.

Menurutnya, paling penting anaknya dapat token saja, karena pendaftaran baru dilakukan di kemudian hari.

"Mungkin ini sudah banyak yang antre di hari pertama karena di point nomor 4 dikatakan siapa yang mendaftar duluan, tapi kalau logika saya ya yang penting dapat token tidak duluan tidak apa, nanti kan yang penting daftarnya," terangnya. (may)

Presiden: Perlu

● Sambungan Hal 1

salah lapangan, sehingga perlu evaluasi.

"Tanyakan pada Menteri Pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi saat ditanyai awak media usai menyerahkan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6).

Jokowi tidak menutupi bahwa memang banyak permasalahan yang perlu dievaluasi dari penerapan sistem zonasi di PPDB pada tahun ajaran kali ini dibanding dengan sebelumnya. Sebelumnya, Muhadjir sudah sempat menjelaskan alasan dipilihnya sistem zonasi PPDB untuk tahun ajaran kali ini, yakni harapan akan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Namun, para wali murid di

sejumlah daerah protes, tidak menerima kehadiran sistem zonasi, lantaran dianggap merugikan dan tidak menghargai capaian akademik yang telah siswa dapatkan. Selain itu, sistem zonasi PPDB juga dianggap memiliki sejumlah kejanggalan. Satu di antaranya lokasi rumah siswa pendaftar yang berada di Samudera Hindia.

Lebih adil

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, tetap meyakini sistem zonasi lebih adil. Sistem zonasi dalam PPDB memberikan akses lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan atau perbedaan status sosial ekonomi.

"Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memperhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari ru-

mahnya," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/6).

Mendikbud Effendy menyebut pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Oleh karena itu, katanya, tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah.

Dia menambahkan apabila seorang anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu mendapat sekolah di dalam zonanya, mereka akan berpotensi putus sekolah karena kendala biaya.

Ia bercerita tentang seorang peserta didik dengan latar belakang keluarga tidak mampu yang terpaksa harus bersekolah di tempat yang jaraknya mencapai 15 kilometer dari rumah. Anak itu berangkat pukul 05.30 dan sampai rumah pukul 18.30.

"Kapan waktunya untuk belajar? Kapan waktunya untuk beristirahat? Belum bi-

ayanya untuk transportasi. Padahal di dekat rumahnya ada sekolah negeri, tapi karena nilainya tidak mencukupi, dia tidak bisa sekolah di sana. Ini kan tidak benar," tuturnya.

Masyarakat yang mampu diminta ikut berpartisipasi dengan membantu sekolah yang ada di sekitarnya sehingga pada saatnya semua sekolah kualitasnya menjadi baik. Selain itu, dalam jangka panjang, pemerintah juga harus menanggung risiko urbanisasi dari penduduk yang tidak memiliki kecakapan kerja dan wawasan hidup, serta hilangnya penduduk yang diharapkan dapat membangun wilayah asalnya.

Kemendikbud meminta ketegasan Disdik menindak sekolah swasta yang tidak memberikan layanan baik, khususnya yang terindikasi hanya demi mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. (kompas.com/tribunnews.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005